

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang dijuluki sebagai salah satu daerah penghasil batik di Indonesia. Berdasarkan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kabupaten Pekalongan memiliki visi utama “Kabupaten Pekalongan yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berkelanjutan.” Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Kabupaten Pekalongan menetapkan 8 misi, yakni:

“Transformasi sosial menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat, transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan; transformasi tata kelola guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; memastikan ketentraman, ketertiban, dan kondusifitas wilayah dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi substansial serta menjaga stabilitas ekonomi makro; memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi secara berkelanjutan; mewujudkan pembangunan wilayah yang serasi, merata, dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.”

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pekalongan melalui laporan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara garis besar perekonomian Kabupaten Pekalongan ditopang oleh tiga sektor utama, yakni sektor industri, sektor pertanian, dan sektor perdagangan dan jasa. Sektor industri yang meliputi tekstil dan konveksi, kerajinan batik, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak utama yang menyumbang hampir 30% terhadap PDRB daerah. Kemudian, sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi pilar ketahanan pangan masyarakat dikarenakan wilayah geografis Kabupaten Pekalongan yang bervariasi dari pegunungan hingga pesisir. Sektor perdagangan dan jasa, terus bertumbuh pesat seiring dengan tingginya produktivitas industri tekstil dan batik.

Tabel 2.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024

No	Sektor	2022	2023	2024
1	Industri Pengolahan	4,1	2,7	2,96
2	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,79	5,32	2,7
3	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,77	2,58	2,17
4	Konstruksi	4,21	11,36	8,11
5	Informasi dan Komunikasi	2,34	10,29	10,14
6	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,9	11,88	11,8

Sumber: BPS Kabupaten Pekalongan dalam Berita Resmi Statistik 2025

Batik, tekstil, dan konvensi, dan merupakan produk dari industri pengolahan yang cukup dikenal dari Kabupaten Pekalongan. Batik khas pekalongan yang Berbeda dengan batik Solo atau Yogyakarta yang terikat pakem keraton (didominasi warna coklat dan motif formal), Batik Pekalongan berkembang sebagai batik pesisir. yang memiliki karakteristik warna yang cerah dan berani: Menggunakan kombinasi warna-warna kontras seperti merah, hijau, biru, jingga, dan merah muda yang cocok dengan wilayah tropis dan Motif Multikultural: Karena posisinya sebagai kota pelabuhan, motifnya menyerap akulturasi budaya dengan pedagang asing, melahirkan ragam hias buketan (pengaruh Eropa/Belanda), motif burung Phoenix (pengaruh Tionghoa), jlamprang (pengaruh India/Arab), hingga batik Sakura (pengaruh Jepang).

Bukan sekadar pusat seni batik tulis, melainkan sebuah ekosistem produksi tekstil terintegrasi. Sentra Konveksi Skala Besar: Daerah seperti Kedungwuni dan Buaran merupakan pusat konveksi rumahan (*garmen*) massal yang mampu

Tabel 2.2 Kecamatan di Kabupaten Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Desa/Kelurahan
1	Kandangserang	60,55	14
2	Paninggaran	92,99	15
3	Lebakbarang	58,20	11
4	Petungkriyono	73,59	9
5	Talun	58,57	10
6	Doro	68,45	14
7	Karanganyar	63,48	15
8	Kajen	75,15	25
9	Kesesi	68,51	23
10	Sragi	32,40	17
11	Siwalan	25,91	13
12	Bojong	40,06	22
13	Wonopringgo	18,80	14
14	Kedungwuni	22,93	19
15	Karangdadap	21,00	11
16	Buaran	9,54	10
17	Tirto	17,39	16
18	Wiradesa	12,70	16
19	Wonokerto	15,91	11

Sumber: Diolah dari data statistik BPS Kabupaten Pekalongan

Secara garis besar wilayah Kabupaten Pekalongan tergolong ke dalam tiga bentuk wilayah, yakni wilayah dataran rendah pesisir, dataran rendah dan dataran tinggi atau pegunungan. Wilayah dataran rendah pesisir di bagian utara meliputi kecamatan Tirto, Buaran, Wiradesa, Wonokerto, dan Siwalan. Wilayah dataran rendah meliputi kecamatan Kedungwuni, Wonopringgo, Karangdadap, Bojong, Sragi, Kajen, dan

Kesesi. Wilayah dataran tinggi atau pegunungan di bagian selatan meliputi kecamatan Karanganyar, Doro, Talun, Lebakbarang, Paninggaran, Kandangserang, Petungkriyono. Kecamatan Kajen menjadi ibu kota Kabupaten Pekalongan dan pusat pemerintahan.

Sebagian besar wilayahnya adalah dataran rendah dengan ketinggian berkisar 4-70 meter dari permukaan laut dan sebagian lain dataran tinggi dengan ketinggian berkisar 276-1.294 meter dari permukaan laut. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Paninggaran dengan persentase luas terhadap luas kabupaten sebesar 11,12 persen. Sedangkan, kecamatan dengan persentase luasan terkecil yaitu Kecamatan Buaran dengan persentase luas terhadap luas kabupaten sebesar 1,11 persen. Kabupaten Pekalongan merupakan wilayah yang beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata antara 22,19oC – 24,75oC pada tahun 2024 sedangkan kelembaban udara rata-ratanya antara 81,36 persen hingga 87,04 persen.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan data statistik tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan adalah 1.019.006 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 1.218,72 jiwa/km². Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang ditunjukkan dengan angka rasio jenis kelamin sebesar 103,22 persen. Kecamatan Buaran menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Pekalongan mencapai 5.058 jiwa/km². Hal tersebut dikarenakan luas wilayah Kecamatan Buaran yang kecil dengan penduduk relatif banyak. Selain itu, karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan Kota Pekalongan yang tingkat aktivitas ekonominya tinggi sehingga menjadi tempat tujuan bermukim dari penduduk Kota Pekalongan.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2024

No	Kecamatan	L	P	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kandangserang	18.530	18.322	36.852
2	Paninggaran	22.530	21.670	44.200
3	Lebakbarang	5.741	5.721	11.462
4	Petungkriyono	6.881	6.654	13.535
5	Talun	16.562	15.721	32.277
6	Doro	24.398	23.328	47.726
7	Karanganyar	24.501	23.587	48.088
8	Kajen	39.463	38.388	77.851
9	Kesesi	37.858	36.962	74.820
10	Sragi	33.399	33.285	66.684
11	Siwalan	21.414	21.087	42.501
12	Bojong	39.956	38.436	78.392
13	Wonopringgo	25.048	24.502	49.550
14	Kedungwuni	52.773	50.781	103.554
15	Karangdadap	22.542	21.169	43.711
16	Buaran	24.503	23.758	48.261
17	Tirto	39.598	37.899	77.497
18	Wiradesa	32.273	31.533	63.806
19	Wonokerto	23.701	22.916	46.617
	Jumlah	511.671	495.713	1.007.384

Sumber: diolah dari data statistik BPS Kabupaten Pekalongan tahun 2024

Dari jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Pekalongan, terdiri dari 511.671 laki-laki dan 495.713 perempuan. Penduduk

Kabupaten Pekalongan sebagian besar berkategori usia produktif yaitu antara 15 tahun-64 tahun dengan total 694.744 jiwa atau 68,96% dari jumlah populasi. Di sisi lain jumlah penduduk dengan kategori usia yang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yaitu 312. 640 jiwa atau 31,03%. Sementara itu, angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 adalah 45,41%. Hal tersebut berarti sekitar 45 orang penduduk usia tidak produktif dapat ditanggung setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Pekalongan.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2024

Kelompok Umur	L	P	Jumlah
0-4	42.542	40.496	83.038
5-9	40.802	38.858	79.660
10-14	39.541	37.366	76.907
15-19	39.533	36.999	76.532
20-24	40.946	39.094	80.040
25-29	44.283	41.246	85.529
30-34	44.522	40.401	84.923
35-39	41.169	37.671	78.840
40-44	36.842	35.175	72.017
45-49	32.794	32.576	65.370
50-54	28.782	29.123	57.905
55-59	25.164	26.044	51.208
60-64	20.935	21.445	42.380
65-69	15.090	16.146	31.236
70-74	9.696	11.044	20.740
75+	9.030	12.029	21.059
Jumlah	511.671	495.713	1.007.384

Sumber: BPS Kabupaten Pekalongan

Jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2024 adalah 1.007.384. Dengan komposisi 511.671 penduduk laki-laki dan 495.713 penduduk perempuan.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Kesesi

Kecamatan Kesesi merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Pekalongan. Visi dan Misi Kecamatan Kesesi mengacu pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi “Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, dan Sejahtera.” Penjabaran dari masing-masing frase visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan meliputi seluruh administrasi wilayah dan semua warganya yang berada di dalam suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 beserta dengan segala isinya termasuk manusia yang menjadi warganya.

2. Maju

Maju yang dimaksud dalam Visi Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan merujuk pada perkembangan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan yang berbudaya dengan kearifan lokal. Maju mengacu pada kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, pendidikan, teknologi, dan infrastruktur.

3. Adil

Adil dimaknai sebagai suatu keadaan yang mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam

setiap aspek kehidupan. Adil juga dimaknai dengan pemerataan pembangunan di Kabupaten Pekalongan yang memiliki 3 wilayah seperti wilayah pesisir, perkotaan dan wilayah pegunungan.

4. Sejahtera

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sejahtera menggambarkan kondisi di mana seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan terpenuhi kebutuhannya baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Sejahtera berarti tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal (no one left behind), adanya akses yang adil ke sumber daya, pekerjaan yang layak, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan sosial bagi mereka yang membutuhkan.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pekalongan.
2. Menuntaskan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan UMKM yang Berdaya Saing.
4. Memperkuat Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Memperkuat Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani.

2.2.1 Kondisi Geografis Kecamatan Kesesi

Secara astronomis Kecamatan Kesesi terletak antara 109,49735 dan 109,55041 Bujur Timur dan antara -6,97457 dan -7,07485 Lintang Selatan dan berada pada ketinggian 40 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Kesesi merupakan salah satu wilayah yang terletak di bagian

ujung selatan wilayah barat Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan publikasi Kecamatan Kesesi dalam Angka 2024, Kecamatan Kesesi memiliki luas wilayah sebesar 68,51 km².

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kecamatan Kesesi



Sumber: Kecamatan Kesesi dalam Angka 2024

Batas wilayah Kecamatan Kesesi di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sragi. Di bagian barat berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kajen dan Kecamatan Bojong. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandangserang.

Secara administratif, wilayah Kecamatan Kesesi terbagi menjadi 23 desa. Dari 23 desa tersebut terdiri dari 121 RW dan 380 RT.

Tabel 2.5 Luas Daerah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kesesi (km²)
Tahun 2024

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	Presentase terhadap Luas Kecamatan
Windurojo	10,74	15,75
Ujung Negoro	5,61	8,90
Brondong	2,91	4,25
Podosari	3,33	4,89
Kwasen	4,51	6,58
Langensari	1,64	2,39
Jagung	2,49	3,36
Watugajah	1,78	2,6
Karangrejo	1,52	2,22
Karyomukti	2,17	3,17
Kesesi	8,75	12,77
Srinahan	1,05	1,53
Kaibahan	2,02	2,95
Watupayung	1,68	2,45
Krandon	2,83	4,13
Ponolawen	1,82	2,66
Kalimade	1,34	1,96
Sidomulyo	2,70	3,96
Sukorejo	2,22	3,24
Sidosari	2,32	3,39
Mulyorejo	1,90	2,77
Pantirejo	1,42	2,07
Kwigaran	1,71	2,50
Total	68,51	100,00

Sumber: Kecamatan Kesesi dalam Angka 2025

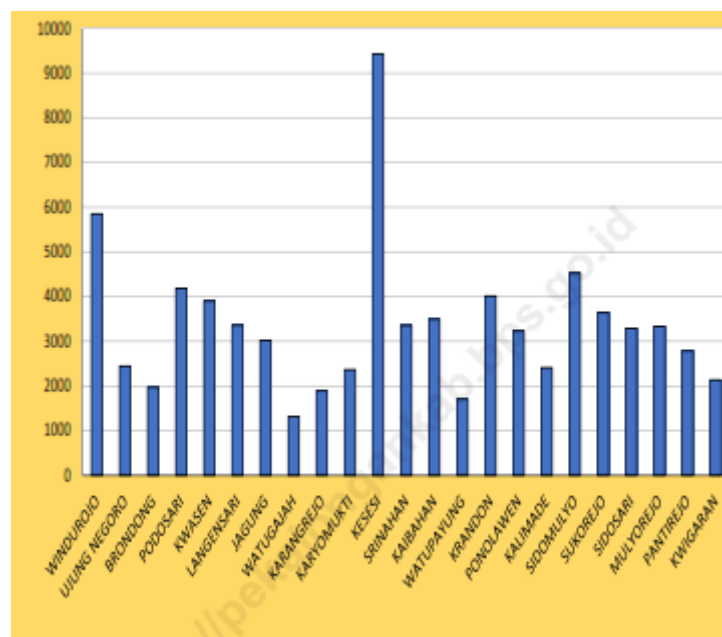
Desa dengan luas wilayah paling luas di Kecamatan Kesesi yakni Desa Windurojo. Desa Windurojo memiliki luas wilayah 10,74 km². Sementara desa dengan luas wilayah paling sempit yakni Desa Srinahan dengan luas wilayah 1,05 km².

Penggunaan lahan di kecamatan ini didominasi oleh sektor pertanian. Dengan rincian lahan sawah mencapai 3.507,97 hektar dan lahan bukan sawah seluas 3.343,06 hektar.

2.2.2 Kondisi Demografis Kecamatan Kesesi

Berdasarkan publikasi Kecamatan Kesesi dalam Angka 2025, jumlah penduduk Kecamatan Kesesi pada tahun 2024 tercatat sebanyak 77.647 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 39.326 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 38.321 jiwa. Pada tahun 2024 rata-rata kepadatan penduduk di Kecamatan Kesesi sebanyak 1.133 jiwa per km². Wilayah terpadat penduduknya adalah Desa Srinahan dengan 3.356 jiwa per km². Sedangkan wilayah dengan kepadatan terendah adalah Desa Ujungnegero.

Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kesesi Tahun 2024



Sumber: Kecamatan Kesesi dalam Angka 2025

Desa dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Desa Kesesi. Sementara desa dengan jumlah penduduk tersedikit berada di Desa Watugajah.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kesesi Tahun 2024

Desa/Kelurahan	L	P	Jumlah
Windurojo	2.975	2.876	5.851
Ujung Negro	1.259	1.188	2.447
Brondong	1.005	965	1.970
Podosari	2.122	2.062	4.184
Kwasen	1.957	1.946	3.903
Langensari	1.688	1.673	3.362
Jagung	1.525	1.499	3.024
Watugajah	667	648	1.315
Karangrejo	964	928	1.892
Karyomukti	1.196	1.171	2.367
Kesesi	4.777	4.647	9.424
Srinahan	1.715	1.641	3.356
Kaibahan	1.805	1.691	3.496
Watupayung	889	819	1.708
Krandon	2.025	1.989	4.014
Ponolawen	1.599	1.630	3.229
Kalimade	1.228	1.181	2.409
Sidomulyo	2.277	2.249	4.526
Sukorejo	1.842	1.794	3.636
Sidosari	1.709	1.579	3.288
Mulyorejo	1.645	1.684	3.329
Pantirejo	1.368	1.414	2.782
Kwigaran	1.088	1.047	2.135
Total	39.326	38.321	77.647

Sumber: Kecamatan Kesesi dalam Angka 2025

Jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Kesesi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 39.326 jiwa. Sementara penduduk perempuan berjumlah 38.321.

Tabel 2.7 Presentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kesesi Tahun 2024

Desa/Kelurahan	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km²)	Rasio Jenis Kelamin
Windurojo	7,54%	544	103.44
Ujung Negoro	3.15%	436	105.98
Brondong	2.54%	676	104.15
Podosari	5.39%	1.256	102.91
Kwasen	5.03 %	865	100.57
Langensari	4.33%	2.050	100.96
Jagung	3.89%	1.214	101.73
Watugajah	1.69%	738	102.93
Karangrejo	2.44%	1.244	103.88
Karyomukti	3.05%	1.090	102.13
Kesesi	12.14%	1.077	102.80
Srinahan	4.32%	3.356	104.51
Kaibahan	4.50%	1.334	106.74
Watupayung	2.20%	1.016	108.55
Krandon	5.17%	1.418	101.81
Ponolawen	4.16%	1.829	98.10
Kalimade	3.10%	1.797	103.98
Sidomulyo	5.83%	1.676	101.24
Sukorejo	4.68%	1.637	102.68

Sidosari	4.23%	1.417	108.23
Mulyorejo	4.29%	1.752	97.68
Pantirejo	3.58%	1.959	96.75
Kwigaran	2.75%	1.248	103.92
Kecamatan Kesesi	100	1.133	102,62

Sumber: Kecamatan Kesesi dalam Angka 2025

Wilayah dengan kawasan penduduk terpadat ada di Desa Srinahan dengan kepadatan penduduk 3,356 jiwa/km² sementara wilayah yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah terdapat di Desa dengan kepadatan 436 jiwa/km².

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kesesi Tahun 2024

Kelompok Umur	L	P	Jumlah
0-4	2.844	2.606	5.450
5-9	2.942	2.859	5.801
10-14	2.948	2.786	5.734
15-19	2.884	2.603	5.487
20-24	3.170	2.905	6.075
25-29	3.395	3.075	6.470
30-34	3.179	2.802	5.981
35-39	2.783	2.534	5.317
40-44	2.885	2.743	5.628
45-49	2.499	2.548	5.047
50-54	2.073	2.186	4.259
55-59	2.164	2.452	4.616
60-64	1.977	2.063	4.040
65-69	1.454	1.509	2.963

70-74	1.072	1.159	2.231
75+	1.057	1.491	2.548
Jumlah	39.326	38.321	77.647

Sumber: Kecamatan Kesesi dalam Angka 2025

Dari jumlah keseluruhan Kecamatan Kesesi, terdiri dari 39.326 jiwa penduduk laki-laki dan 38.321 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kecamatan Kesesi sebagian besar berkategori usia produktif yaitu antara 15 tahun - 64 tahun dengan total 52.920 jiwa atau 46,73% dari jumlah populasi. Di sisi lain jumlah penduduk dengan kategori usia yang tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yaitu jiwa 24.727 atau 30,42%. Sementara itu, angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Jepara untuk tahun 2021 adalah 31,85%. Ini artinya bahwa sekitar 31 orang penduduk usia tidak produktif dapat ditanggung setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kecamatan Kesesi.

Selain memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, Kecamatan Kesesi juga tercatat sebagai salah satu kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data profil kewilayahan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Penduduk tersebut tersebar secara administratif di 23 desa, 65 dusun, 122 RW, dan 378 RT. Desa dengan populasi terbesar sekaligus menjadi pusat keramaian dan pemerintahan berada di Desa Kesesi.

Tabel 2.9 Jumlah RT dan RW Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024

Desa/Kelurahan	RW	RT
Windurojo	9	20
Ujung Negoro	3	13
Brondong	2	8
Podosari	6	14
Kwasen	8	28
Langensari	3	17

Jagung	4	14
Watugajah	2	8
Karangrejo	3	9
Karyomukti	5	14
Kesesi	13	52
Srinahan	4	12
Kaibahan	4	18
Watupayung	4	9
Krandon	5	19
Ponolawen	6	17
Kalimade	3	12
Sidomulyo	2	13
Sukorejo	8	16
Sidosari	9	18
Mulyorejo	6	21
Pantirejo	7	17
Kwigaran	5	11
Total	121	380

Sumber: Kecamatan Kesesi dalam Angka 2025

Pada tahun 2024 total terdapat 121 Rukun Warga (RW) di Kecamatan Kesesi. Sementara total Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Kesesi sebanyak 380.

2.3 Gerakan KUDU Sekolah

2.3.1 Gambaran Umum Gerakan KUDU Sekolah

Menurut buku panduan pelaksanaan Gerakan KUDU Sekolah Kabupaten Pekalongan 2020, gerakan KUDU Sekolah (Kembali Upayakan Dukungan Untuk Sekolah) merupakan gerakan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan stakeholder dalam rangka

menurunkan jumlah ATS secara signifikan di wilayah Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Tim Sekretariat Pendidikan Untuk Semua (PUS) menginisiasi Gerakan KUDU Sekolah sejak bulan Desember 2018. Kemudian pada 2 Mei 2019 gerakan ini diresmikan.

Gerakan ini melibatkan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Pekalongan seperti pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, akademisi, serta sektor swasta. Gerakan ini merupakan gerakan sinergi mendata, mengonfirmasi, mendampingi dan memonitor Anak Tidak Sekolah (ATS) agar dapat kembali bersekolah dengan basis teknologi digital. Gerakan ini berupaya untuk mengembalikan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, memastikan anak yang kembali bersekolah agar menyelesaikan pendidikan, serta melanjutkan pendidikan sesuai tingkat pendidikan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.

2.3.2 Landasan Hukum

Penanganan ATS melalui Gerakan KUDU Sekolah ini dilandasi oleh beberapa dasar hukum, antara lain:

1. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan,” dan Ayat 2 berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam Pasal 6 menyebutkan, “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.”;
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada bagian ke-6 tentang Hak Pendidikan Pasal 10 Ayat (a) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan

- pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
5. UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019;
 6. PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 7. PP Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 8. Perpres Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN 2019;
 9. Permenkeu tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non-fisik;
 10. Permendikbud tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non-fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019;
 11. Perda Kab. Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 12. Perda Kab. Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Pekalongan;
 13. Perda Kab. Pekalongan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
 14. Perbub Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
 15. Perbub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
 16. Perbub Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
 17. Perbub Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019; dan
 18. Perbub Nomor 48 Tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 Tahun.

2.3.3 Tujuan Gerakan KUDU Sekolah

Terdapat empat tujuan gerakan ini, yakni meningkatkan akses layanan pendidikan dasar dan menengah berkualitas, menurunkan jumlah ATS di Kabupaten Pekalongan, Mendampingi anak yang sudah kembali bersekolah agar menyelesaikan sekolah sesuai jenjang pendidikan, serta menurunkan angka kemiskinan melalui sektor pendidikan.

2.3.4 Sasaran

Gerakan KUDU Sekolah ini memiliki tiga sasaran dalam yakni:

1. Anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah (termasuk Anak Berkebutuhan Khusus/ABK dan Anak Penyandang Disabilitas/APD) yang sudah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu, yaitu SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, tetapi *dropout* (berhenti/putus sekolah).
2. Anak usia 7-18 tahun tidak melanjutkan sekolah (termasuk ABK/APD) yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, yaitu SD/MI, SMP/MTs, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Anak usia 7-18 tahun yang belum sekolah atau tidak pernah sekolah (termasuk ABK/APD) yang belum atau tidak pernah bersekolah baik jenjang pendidikan SD/MI, SMP/ MTs, SMA/ SMK /MA baik pada pendidikan formal dan non-formal.

2.3.5 Tim KUDU Sekolah Tingkat Kabupaten

Tim KUDU Sekolah Tingkat Kabupaten Tim Kudu Sekolah tingkat Kabupaten dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 420.1/193 Tahun 2020 yang diketuai oleh Tim PKK Kabupaten Pekalongan. Anggota Tim terdiri dari perwakilan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda Litbang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta organisasi kemasyarakatan seperti Aisyiyah dan Mulimat. Tim

Kudu Sekolah di tingkat Kabupaten memiliki tugas untuk mengordinasikan dan memimpin setiap aksi yang berkaitan dengan penurunan angka ATS. Tim KUDU Sekolah tingkat kabupaten bertanggung jawab atas hal-hal berikut :

- a. Memberikan dukungan kebijakan yang dibutuhkan oleh bupati dalam penyelenggaraan program wajib belajar di Kabupaten Pekalongan
- b. Mengkoordinasikan Tim Gerakan KUDU Sekolah di tingkat kecamatan.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Gerakan KUDU Sekolah.

2.3.6 Tim KUDU Sekolah Tingkat Kecamatan

Tim Kudu Sekolah di tingkat kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan dan berfungsi sebagai penghubung antara tim Kudu Sekolah di tingkat kabupaten dan desa. Dalam hal ini, tim Kudu Sekolah tingkat kecamatan bertanggung jawab atas empat tugas utama, yaitu perencanaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi, serta dukungan kolaborasi dan dana. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Pendataan ATS
 1. Membuat rencana program, kegiatan, dan tindakan tim.
 2. Mengkoordinasikan Tim Gerakan KUDU Sekolah di tingkat desa. Dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data ATS.
 3. Memeriksa kelengkapan data dan menyesuaikannya dengan format pendataan Gerakan KUDU Sekolah.
 4. Membantu tim Gerakan KUDU Sekolah Tingkat Desa bekerja sama dalam proses pengisian laporan.
 5. Mengirimkan data ATS yang telah diverifikasi dan validasi dari desa ke kabupaten.

b. Jangkauan ATS

1. Melakukan koordinasi dengan Tim Gerakan KUDU di Sekolah Tingkat Desa selama proses jangkauan ATS ke rumah.
2. Mendapatkan data dari desa yang relevan dengan ATS yang bersedia atau tidak bersedia untuk kembali ke sekolah.
3. Berkomunikasi dan membantu siswa yang akan dikembalikan ke sekolah dengan satuan pendidikan yang dipilih siswa tersebut.
4. Memberikan penjelasan kepada satuan pendidikan tentang pengembalian ATS.
5. Mengatur prosedur pengembalian ATS dari pendaftaran hingga masuk kembali ke sekolah.

c. Monitoring dan Evaluasi

1. Melakukan kegiatan monev terhadap satuan pendidikan formal dan non-formal yang telah menerima ATS.
2. Membuat laporan perkembangan anak yang dikembalikan ke sekolah sebagai hasil dari monev.
3. Memastikan bahwa satuan pendidikan formal dan nonformal mendapatkan dukungan untuk turut serta aktif dalam memonitor ATS yang sudah kembali ke sekolah di satuan pendidikannya.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa bersama dengan Tim Pengawas Sekolah/Koordinasi Sekolah.

d. Kemitraan dan Pembiayaan ATS

1. Memberi pelatihan dan pembekalan kepada Tim Gerakan KUDU di Sekolah Tingkat Desa.
2. Mengatur pengelolaan, pengembangan, dan penguatan.
3. Kemitraan dan kepedulian dari semua bagian masyarakat di wilayah kerjanya.

4. Menemukan cara lain untuk mendukung pelaksanaan Gerakan KUDU Sekolah di wilayah kerjanya dengan mencari pembiayaan pendidikan.
5. Memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada Tim Gerakan KUDU Sekolah Tingkat Desa tentang seluruh proses pengembalian ATS.

2.3.7 Tim KUDU Sekolah Tingkat Desa

Tim KUDU Sekolah tingkat Desa menjadi salah satu ujung tombak dari Gerakan KUDU Sekolah, hal ini dikarenakan pemerintah desa yang merupakan salah satu aktor yang berada dalam tim ini memiliki kemampuan untuk menjangkau secara langsung sasaran yang dimaksud yaitu ATS. Tim KUDU sekolah di tingkat desa diketuai oleh Sekretaris Desa dan memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Pendataan ATS
 1. Membuat rencana program, kegiatan, dan tindakan tim.
 2. Mengumpulkan, memverifikasi, dan memvalidasi data ATS.
 3. Mengisi data sesuai dengan format pendataan Gerakan KUDU Sekolah.
 4. Membuat laporan hasil.
 5. Mengirimkan data ATS yang sudah divalidasi kepada Tim KUDU Sekolah Tingkat Kecamatan.
 6. Memasukkan data ke dalam sistem aplikasi KUDU Sekolah.
- b. Jangkauan ATS
 1. Melakukan proses penjangkauan ATS ke rumah-rumah.
 2. Berkomunikasi dengan siswa dan keluarga ATS agar mereka bersedia kembali bersekolah.
 3. Mengirimkan data ATS yang bersedia atau tidak bersedia ke sekolah kepada Tim Gerakan KUDU Sekolah Tingkat Kecamatan.

4. Membuat laporan hasil pendampingan sesuai dengan format pelaporan.
5. Bekerja sama dengan Tim Gerakan KUDU Sekolah Tingkat Kecamatan tentang proses pengembalian ATS.